



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN

Zain Yudha Prawira ¹⁾; Masruri Muchtar ²⁾; Pardomuan Robinson Sihombing ³⁾

¹⁾ zainyudha@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ masruri.m@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ robinson@bps.go.id, Badan Pusat Statistik

Abstract

This study aims to analyze the factors that influence the revenue of Land and Property Tax in plantation, forestry and mining sector (PBB P3) in Central Java. This study uses panel data of 20 regencies in Central Java with a time period of 2019 to 2021. The dependent variable in this study is the revenue of PBB P3, while investment, forestry area and plantation area are independent variables. The results indicate the revenue of PBB P3 in Central Java fluctuates every year. It is found that investment, forest area and garden area simultaneously have a significant effect on PBB P3. The effect of forest area on PBB P3 has a positive effect, which means that if the forestry area increases, PBB P3 tends to increase. Meanwhile, investment and plantation area have no significant effect on PBB P3. The implication of the study is able to be a reference for the government in making a decision regarding Land and Building Tax policies in plantation, forestry and mining sector.

Keywords: Investment; Forestry; Plantation, Mining; Land and Property Tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB P3) di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data panel pada 20 kabupaten di Jawa Tengah periode 2019 sampai 2021. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 (PBB P3), sementara investasi, luas hutan dan luas kebun menjadi variabel independen. Hasilnya menunjukkan penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah berfluktuasi setiap tahun. Diperoleh bahwa investasi, luas hutan dan luas kebun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PBB P3. Pengaruh luas hutan terhadap PBB P3 berpengaruh positif yang berarti bahwa apabila luas hutan mengalami kenaikan maka PBB P3 juga akan mengalami kenaikan. Sementara itu, investasi dan luas kebun tidak berpengaruh signifikan terhadap PBB P3 di Jawa Tengah. Implikasi dari penelitian ini yaitu bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Kata Kunci : Investasi; Perhutanan; Perkebunan; Pertambangan; Pajak Bumi dan Bangunan

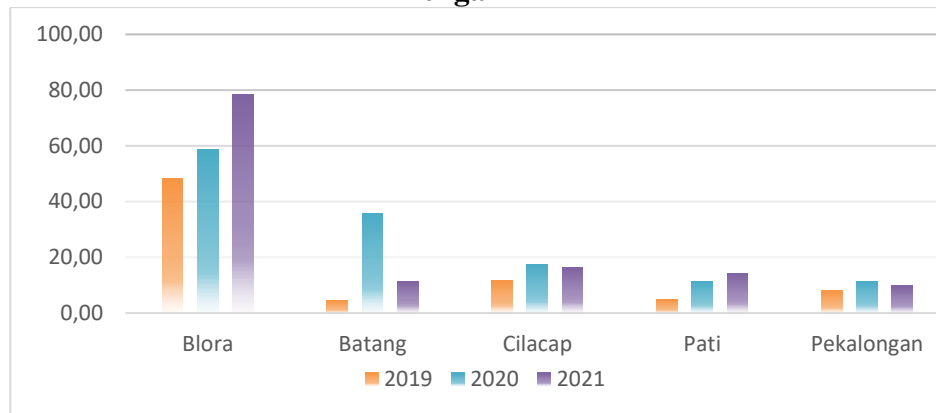
PENDAHULUAN

Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Salah satu komponen penerimaan pajak yang ikut berkontribusi di dalam penerimaan pajak adalah PBB P3. PBB P3 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan pada sektor P3 (perkebunan, perhutanan dan pertambangan) sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan PBB P3 di setiap daerah di Indonesia bervariasi besarnya.

Dari tahun ke tahun, penerimaan PBB terus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh perubahan kenaikan nilai tanah yang terus menerus sesuai dengan semakin luasnya tanah yang digunakan oleh masyarakat dalam kebutuhan ekonomi (Yunarsih, 2015). Salah satunya yaitu PBB P3 yang berasal dari Jawa Tengah yang cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai 2021 meskipun di tahun 2019 dan 2021 terjadi penurunan. Berdasarkan data BPS, saat ini ada sekitar 20 kabupaten yang memiliki realisasi penerimaan PBB P3. Tidak semua daerah di Jawa Tengah memiliki potensi penerimaan PBB P3 dari sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dikarenakan kondisi dan karakteristik alam di setiap daerah di Jawa Tengah memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Berikut ini lima kabupaten di Jawa Tengah dengan realisasi penerimaan PBB P3 terbesar dari tahun 2019 sampai tahun 2021 yang telah tertuang di dalam gambar 1.



Gambar 1. Kabupaten dengan Realisasi Penerimaan PBB P3 terbesar di Jawa Tengah



Sumber: BPS Jawa Tengah (2022)

Berdasarkan gambar 1, Kabupaten Blora merupakan daerah dengan penerimaan PBB P3 terbesar. Hal ini dikarenakan ada banyak perusahaan perkebunan dan perhutanan baik itu BUMN maupun swasta yang melakukan pengelolaan hutan di Kabupaten Blora yang selanjutnya disusul oleh Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan. Selain itu, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi naik turunnya penerimaan PBB P3 seperti investasi, jumlah perusahaan perkebunan maupun luas wilayah objek PBB P3 seperti luas hutan di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan investasi bisa memberikan dampak pada perekonomian. Sementara untuk jumlah perusahaan perkebunan dan luas hutan juga mampu mempengaruhi naik turunnya penerimaan PBB P3.

Penelitian terdahulu telah dilakukan terkait analisis faktor yang mempengaruhi PBB di beberapa wilayah. Namun, masih jarang yang meneliti tentang faktor yang bisa mempengaruhi PBB P3. Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang PBB umumnya hanya menggunakan PBB P2 (perdesaan dan perkotaan) yang dikelola oleh pemerintah daerah. Misalnya, Paramban (2018) meneliti PBB P2 berdasarkan faktor jumlah wajib pajak dan PDRB. Agustina et al (2016) mengungkapkan PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap PBB P2, jumlah wajib pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap PBB P2 sementara inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PBB P2 di Sumatera Selatan. Riskiana & Furqon (2020) mengungkapkan bahwa pelayanan dan penyuluhan bisa memberikan pengaruh signifikan dalam peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran PBB P3. Sasana (2005) menggunakan variabel PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan, jumlah bangunan dan moneter dalam meneliti pengaruh PBB P2 di Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Rini & Astuti (2021) hanya meneliti kontribusi PBB P2 terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait faktor apa saja yang bisa mempengaruhi penerimaan PBB P3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah investasi, luas hutan dan luas kebun memiliki pengaruh terhadap penerimaan PBB P3. Hal ini dilakukan agar para pemangku kepentingan bisa mengambil suatu keputusan terbaik dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan investasi maupun perpajakan khususnya yang memiliki potensi pada PBB P3, sehingga bisa menjadi referensi pemerintah dalam membuat peraturan terkait kemudahan perizinan dalam hal investasi maupun izin usaha perkebunan, perhutanan, serta pertambangan.

**KAJIAN PUSTAKA****Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan (PBB P3)**

Salah satu komponen penerimaan pajak yang ikut berkontribusi di dalam penerimaan pajak adalah PBB P3. PBB P3 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dikenakan kepada sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan PBB P3 di setiap daerah di Indonesia bervariasi besarnya. Salah satunya yaitu PBB P3 yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021 meskipun di tahun terjadi penurunan sebesar 2,1% yang diakibatkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, saat ini ada sekitar 20 kabupaten dan/atau kota yang memiliki realisasi penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah dari total keseluruhan 29 kabupaten dan 6 kota. Tidak semua daerah kabupaten maupun kota di Jawa Tengah memiliki realisasi PBB P3. Hal ini dikarenakan hanya daerah tertentu saja yang memiliki potensi sumber daya alam dari sumber perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya PBB P3 yang nantinya akan berdampak pada peningkatan APBN maupun APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di setiap daerah penghasil PBB P3 khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Investasi

Investasi jika diartikan secara sempit merupakan suatu pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh penghasilan. Sementara itu, merujuk pada Sukirno (2015, dikutip dalam Bawinti, 2018) investasi bisa dijelaskan sebagai suatu pengeluaran untuk penanaman modal maupun dalam suatu perusahaan dalam membeli barang modal dan perlengkapan produksi yang digunakan untuk menciptakan suatu kesanggupan memproduksi barang dan jasa yang tersedia di dalam bidang perekonomian. Investasi bisa dilakukan di berbagai bidang. Jika dihubungkan dengan PBB P3, investasi bisa dilakukan di bidang perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Investasi yang dilakukan di sektor P3 tentunya akan mampu menambah areal perkebunan, areal perhutanan dan produksi pertambangan. Ketika investasi di sektor P3 meningkat, maka realisasi penerimaan PBB P3 di wilayah Jawa Tengah akan ikut berdampak perubahannya. Investasi di bidang perkebunan dan perhutanan tidak semulus investasi di bidang lain. Sebagai contoh, investasi di perkebunan karet cenderung mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Meiratania (2017) mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang melakukan usaha perkebunan karet berada antara level rendah dan sedang. Selain itu, investasi di bidang perkebunan juga memiliki banyak biaya tidak langsung lainnya. Biaya tidak langsung tersebut terdiri dari biaya lingkungan dan biaya sosial yang terjadi sebagai dampak dari eksternalitas atas perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, investasi perkebunan kelapa sawit masih bisa dikatakan layak untuk dijadikan peluang, karena manfaat yang diterima investor lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan (Asyuzal et al., 2020). Investasi di bidang perhutanan juga mengalami hal yang sama, ada banyak permasalahan yang terjadi seperti banyaknya kebijakan yang mengatur terkait investasi di sektor kehutanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Indartik, 2008), kebijakan investasi hutan yang ditetapkan pemerintah tidak mendukung pasar kayu. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, perubahan nilai investasi di bidang perkebunan dan perhutanan masih mengalami perubahan yang diakibatkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang mendukung investasi maupun faktor yang menghambat investasi, sehingga dari tahun ke tahun investasi di setiap daerah berbeda-beda besaran serta bidang yang menjadi dasar dalam menanamkan investasi. Investasi semestinya bisa memberikan dampak pada perekonomian di Jawa Tengah khususnya pada sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dengan demikian, terdapat sebuah dugaan bahwa investasi seharusnya bisa memberikan pengaruh pada



penerimaan PBB P3 karena telah memberikan tambahan modal dan membuka perusahaan baru pada sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan di Jawa Tengah.

Luas Hutan

Luas hutan di wilayah Jawa Tengah bervariasi di setiap kabupaten. Hal ini dikarenakan tidak semua kabupaten memiliki hutan, baik hutan alami maupun hutan yang ditanam secara mandiri. Perusahaan yang telah memiliki izin pengelolaan hutan tentunya memiliki luas hutan sesuai dengan izin yang diajukan kepada pemerintah. Berdasarkan data BPS, hanya beberapa wilayah saja di daerah Jawa Tengah yang memiliki potensi dari sektor perhutanan. Kabupaten Blora merupakan daerah dengan pemegang izin usaha pengelolaan hutan yang terbanyak, sehingga potensi penerimaan dari sektor PBB P3 di Kabupaten Blora cukup besar dan bahkan terbesar di Jawa Tengah. Hal ini tidak lepas dari peran serta sektor perhutanan yang telah memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara. Luas hutan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam PBB P3. Hal ini dikarenakan PBB P3 dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperoleh dari perkalian luas objek PBB P3 yaitu luas hutan. NJOP sektor perhutanan diperoleh dengan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan berapa standar harga pasaran per meter persegi untuk setiap luas tanah perhutanan di masing-masing wilayah. Hal ini dikarenakan, berbeda wilayah maka berbeda juga nilai harga pasar atas luas hutan per meter persegi. Dengan demikian, luas hutan bisa memberikan pengaruh dalam realisasi penerimaan PBB P3.

Luas Kebun

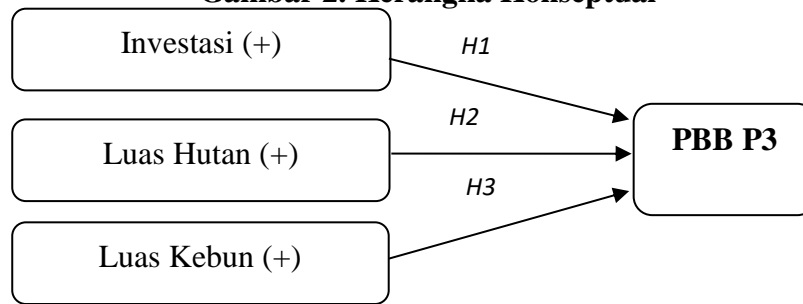
Luas kebun merupakan luas atas suatu perkebunan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Menurut BPS, perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan yang memiliki badan hukum dan telah mendapatkan izin usaha perkebunan dalam melakukan kegiatan budidaya perkebunan yang mana tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan laba dari sektor perkebunan. Perusahaan perkebunan harus memiliki areal perkebunan dan areal emplasemen. Di dalam penghitungan PBB P3, luas bumi terdiri dari luas bangunan dan luas kebun. Dengan demikian luas kebun menjadi salah satu hal penting yang bisa mempengaruhi realisasi penerimaan PBB P3 di suatu wilayah. Hampir sama dengan luas hutan, luas kebun bisa dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam PBB P3. Hal ini dikarenakan PBB P3 dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperoleh dari perkalian luas objek PBB P3. Untuk penentuan NJOP suatu perkebunan, biasanya ditetapkan dengan proses penilaian oleh tim penilai dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan berapa standar harga pasaran per meter persegi di masing-masing wilayah. Hal ini dikarenakan, berbeda wilayah maka berbeda juga nilai harga pasar atas luas kebun per meter persegi. Dengan demikian, luas kebun bisa memberikan pengaruh pada penerimaan PBB P3. Luas perkebunan di Jawa Tengah juga bervariasi di setiap daerah, hal ini dikarenakan karakteristik alami dari wilayahnya juga sangat unik, sehingga akan berdampak pada realisasi penerimaan PBB P3 bagi Jawa Tengah per masing-masing kabupaten.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka konseptual di dalam penelitian ini yang nantinya dapat memberikan kemudahan dalam berpikir terkait variabel yang digunakan. Berikut ini penjelasan terkait kerangka konseptual pada penelitian ini yang dapat diilustrasikan pada gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah Penulis

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual sebagaimana pada gambar 2, berikut ini hipotesis sementara yang terdapat pada penelitian ini:

H1: Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBB P3

H2: Luas Hutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBB P3

H3: Luas Kebun berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBB P3

METODE

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2019 sampai 2021. Untuk data PBB P3, data yang digunakan hanya 20 kabupaten karena tidak semua kabupaten di Jawa Tengah memiliki potensi dari sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Penelitian ini menggunakan data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Menurut Gujarati (2004, dikutip dalam Yohansa, 2021) regresi data panel merupakan suatu teknik regresi yang mana terdapat penggabungan data Cross-Section dan data Time-Series sehingga nantinya mempunyai observasi lebih banyak dibandingkan dengan data Cross-Section ataupun data Time-Series biasa. Melalui data panel, penelitian dapat dilakukan terhadap subjek penelitian dari suatu waktu ke waktu. Berikut ini persamaan dengan model Cross-Section.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

N merupakan banyaknya data Cross-Section. Berikut ini persamaan model Time-Series:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

T merupakan banyaknya waktu pada time series. Berikut ini persamaan data panel berdasarkan penggabungan Cross-Section dan Time-Series.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$i = 1, 2 \dots N; t = 1, 2, \dots, T$$

Y merupakan variabel yang digunakan, sementara itu X adalah variabel independen, N banyaknya data yang diamati, T adalah banyak waktu penelitian, sehingga N dikali T merupakan banyaknya data panel.

Penelitian ini difokuskan pada penerimaan PBB P3 di kabupaten/kota yang memiliki realisasi dari sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal ini dikarenakan tidak semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki potensi PBB P3. Untuk menentukan apakah investasi, luas kebun dan luas hutan berpengaruh pada penerimaan PBB P3, penelitian ini menggunakan Random Effect Model dengan data panel. Selanjutnya, untuk melihat apakah model penelitian ini sudah memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), maka dapat dilakukan uji asumsi klasik. Uji Asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Uji Normalitas dilakukan untuk menganalisis apakah variabel independen dan variabel independen terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016). Uji Multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk menganalisis apakah terdapat relasi variabel independen atau variabel bebas (Ghozali, 2016).



Untuk Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi dapat diabaikan karena diasumsikan bahwa Random Effect Model telah menggunakan General Least Square (GLS) dapat mengatasi Heteroskedastisitas dan Autokorelasi (Melati & Suryowati, 2018). Secara matematika, variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dibuat ke dalam bentuk sebuah persamaan berikut:

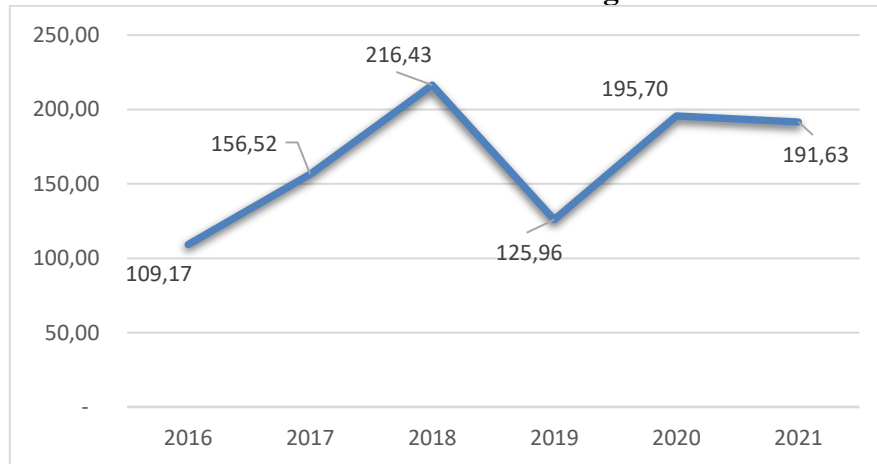
$$LPBBP3_{it} = \alpha + \beta_1 LInv_{it} + \beta_2 Lhut_{it} + \beta_3 Lkbn_{it} + \mu_{it}$$

Dimana PBB P3 merupakan penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah, LInv merupakan investasi, Lhut merupakan luas hutan serta Lkbn merupakan luas kebun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi, luas kebun dan luas hutan terhadap penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah. Hampir mayoritas kabupaten yang memiliki penerimaan PBB P3 hanyalah daerah yang memiliki kawasan pertanian, hutan, perkebunan dan pertambangan saja. Berikut ini grafik penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah dari tahun 2019-2021 sebagaimana di dalam Gambar 3.

Gambar 3. Penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah Tahun 2016-2021.



Sumber: BPS Jawa Tengah (Diolah Penulis), 2022

Berikut ini hasil pengolahan statistik deskriptif dari penelitian ini yang dijelaskan pada setiap variabel sebagaimana tertuang di dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	PBB P3	Investasi	Luas Kebun	Luas Hutan
Obs	60	60	60	60
Mean	8,27	81,15	10.342,96	36.829,27
Min	0	0	1.477,25	748,90
Max	78,55	1.434,38	32.219,77	163.719,02
Std. Dev.	14,24	239,88	7.551,24	36.910,83

Sumber: Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 1, banyak data variabel PBB P3 pada penelitian ini sebanyak 60 data. Rata-rata dari penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai 2021 sebesar 8,27 miliar. Nilai terendah penerimaan PBB P3 adalah 0 sementara nilai terbesar penerimaan PBB P3 sebesar 78,55. Hal ini menandakan bahwa ada satu daerah yang tidak memiliki realisasi penerimaan PBB P3 pada tahun tertentu. Nilai standar deviasi PBB P3 sebesar 14,24 lebih besar dari rata-ratanya sebesar 8,14 yang artinya variabel PBB P3 bersifat heterogen. Banyak data variabel investasi pada penelitian ini sebanyak 60 data. Rata-rata dari variabel investasi sebesar 81,15 miliar. Nilai terendah investasi adalah 0 sementara nilai terbesar investasi sebesar 1.434,38 miliar. Hal ini menandakan bahwa ada satu daerah yang tidak memiliki investasi pada tahun tertentu. Nilai standar deviasi investasi sebesar 239,88 lebih besar dari rata-ratanya sebesar 81,15 yang artinya variabel investasi bersifat heterogen. Data luas kebun berjumlah



sebanyak 60 data. Rata-rata variabel luas kebun yaitu 10.342,96 hektar. Luas kebun terbesar yaitu 32.219,77 hektar sedang terkecil 1.477,25 hektar. Nilai standar deviasi variabel luas kebun sebesar 7.551,24 lebih kecil dari rata-ratanya sebesar 10.342,96 yang artinya variabel investasi bersifat homogen. Data luas hutan berjumlah sebanyak 60 data. Rata-rata variabel luas hutan yaitu 36.829,27 hektar. Luas hutan terbesar yaitu 163.719,02 hektar sedang terkecil 748,90 hektar. Nilai standar deviasi variabel luas hutan sebesar 36,910 lebih besar dari rata-ratanya sebesar 36.829,27 yang artinya variabel investasi bersifat heterogen. Dalam menentukan pengaruh investasi, luas kebun dan luas hutan terhadap penerimaan PBB P3, aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu STATA. Sebelum melakukan uji hipotesis, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam menentukan metode data panel yang terbaik untuk penelitian ini. Berikut ini rangkuman pengujian estimasi model data panel pada penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Model Data Panel

Model Estimasi	Hasil p-value	Model yang digunakan
<i>Chow Test</i>	0,0000	<i>fixed effect model</i>
<i>Hausman Test</i>	0,8668	<i>random effect model</i>
<i>Lagrange Multiplier Test</i>	0,0000	<i>random effect model</i>

Sumber: Diolah Penulis.

Berdasarkan Tabel 2, model yang terbaik yang digunakan yaitu Random Effect Model. Setelah dilakukan uji untuk model estimasi, maka tahapan selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji validitas data yang diteliti secara teori dan tidak bias (Gujarati, 2013, dikutip dalam Febriana & Yulianto, 2017). Berikut ini penjelasan uji asumsi klasik yang telah tertuang di Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	P-value	Kesimpulan
Normalitas	0.0930	Data Terdistribusi Normal
Heteroskedastisitas	0.0000	Terdapat Gejala Heteroskedastisitas
Multikolinieritas	1.13	Tidak Terdapat Gejala Multikolinieritas
Autokorelasi	0.6220	Tidak Terdapat Gejala Autokorelasi

Sumber: Diolah Penulis

Uji asumsi klasik dilakukan dengan melakukan Uji Normalitas, Uji Heteroskedastis, Uji Multikolinieritas dan Uji Autokorelasi. Berdasarkan Tabel 3, terdapat satu uji asumsi klasik yang tidak terpenuhi yaitu Uji Heteroskedastisitas. Untuk hasil dari Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi pada penelitian ini dapat diabaikan karena diasumsikan bahwa Random Effect Model telah menggunakan General Least Square (GLS) dapat mengatasi Heteroskedastisitas dan Autokorelasi (Melati & Suryowati, 2018).

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik pada tabel 3, data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil Skewness/Kurtosis Test bahwa p-value bernilai 0,0930 dan lebih besar dari alfa (0,05). Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa data pada penelitian tidak terdapat gejala multikolinieritas. Hal ini bisa terlihat melalui Uji Variance Inflation Factor (VIF) dengan nilai VIF sebesar 1,13 atau dibawah 10. Sementara untuk Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi bisa diabaikan dikarenakan model data panel yang digunakan menggunakan Random Effect Model (Melati & Suryowati, 2018).

Proses selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis data panel dengan Random Effect ML Regression. Hasil dari uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Menggunakan Random Effect ML Regression

	Coef.	Std. Err.	z	P > z
Linvestasi	.003333	.0384478	0.09	0.931
Lluashut	1.015843	.1860198	5.46	0.000



Luaskbn	-.2012172	.246607	0.82	0.415
_cons	.1349352	2.619.533	5.15	0.000
/sigma_u	.9836641	.1692803		
/sigma_e	.3730542	.044744		
rho	.8742556	.0471414		
R-Square	60.61			
Prob > chi2	0.003			

Sumber: Data sekunder (Diolah Penulis)

Melalui hasil pada tabel 4, berikut ini model regresi yang ditulis secara matematis:

$$\hat{Y} = 13,49352 + 0,003333LInv_{it} + 1,015843Lhut_{it} - 0,2012172Lkbn_{it}$$

Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa koefisien R-square sebesar 60,61 persen yang artinya variabel PBB P3 dapat dijelaskan oleh investasi, luas kebun dan luas hutan sebesar 60,61 persen, dan sisanya 39,39 dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian. Berdasarkan Tabel 4, diketahui nilai probabilitas statistik F (alfa = 0,05) sebesar 0,0003 atau dibawah alfa yang artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

Pembahasan

Pengaruh Investasi terhadap PBB P3

Variabel investasi mempengaruhi variabel PBB P3 secara positif dan tidak signifikan. Dengan demikian, investasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB P3. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al (2020) yang mengemukakan bahwa investasi dan wajib pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Malinda et al (2014) yang mengemukakan bahwa investasi memiliki pengaruh positif terhadap PBB-P2 di Pasaman Barat. Meskipun variabel yang diteliti hampir sama, namun pada dasarnya investasi bisa memberikan dampak terhadap PBB secara keseluruhan. Selain itu, investasi yang ada di Jawa tengah tidak banyak yang bergerak di bidang perkebunan, perhutanan dan pertambangan, sehingga tidak terjadi peningkatan perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang signifikan.

Pengaruh Luas Hutan terhadap PBB P3

Variabel luas hutan mempengaruhi variabel PBB P3 secara positif dan signifikan. Peningkatan luas hutan sebesar satu persen akan meningkatkan penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah sebesar 1,015843 persen. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Afriyannah & Waluyo (2015) yang menyatakan bahwa luas lahan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2). Meskipun sektor yang diteliti berbeda, namun untuk PBB P2 dan PBB P3 sektor hutan memiliki karakteristik yang sama yaitu sedikitnya areal produktif yang menjadi dasar pengenaan serta penghitungan PBB P3. Hasil tersebut sesuai dengan penjelasan di dalam Peraturan Dirjen Pajak No.42/PJ/2015 Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa NJOP bumi merupakan perkalian dari luas areal objek PBB Perhutanan dengan NJOP bumi per meter persegi. Dengan demikian, luas hutan menjadi salah satu dasar penghitungan dalam penentuan PBB P3. Semakin luas areal objek PBB Perhutanan, maka akan semakin besar nilai yang menjadi dasar pengenaan PBB P3 Perhutanan. Selain itu, hampir semua luas perhutanan yang memiliki izin merupakan hutan produktif, sehingga perbandingan antara luas areal produktif dengan luas areal tidak produktif sangat kecil karena pada dasarnya areal hutan yang memiliki izin pengelolaan hutan merupakan areal yang siap pakai, bukan areal yang ditanami dari awal seperti halnya perkebunan. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, PBB P3 dari sektor perhutanan merupakan penyumbang terbesar PBB P3 yaitu sebesar 95,713 miliar pada tahun 2021 yang mengalahkan sektor perkebunan dan sektor pertambangan. Banyaknya perusahaan pengelola



perkebunan di Jawa Tengah juga bisa mempengaruhi besaran luas perhutanan daerah tersebut baik itu perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta.

Pengaruh Luas Kebun terhadap PBB P3

Variabel luas kebun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PBB P3 di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan, peningkatan luas perkebunan di Jawa Tengah tidak diiringi dengan luas areal produktif yang besar juga. Berbeda dengan areal perhutanan, areal perkebunan memiliki areal yang belum produktif atau tidak produktif yang cenderung lebih besar dikarenakan areal perkebunan hampir semuanya berasal dari areal yang ditanami dari awal. Pengenaan PBB P3 tentunya juga melihat faktor produktif, seperti areal produktif, areal belum produktif serta areal tidak produktif. NJOP untuk areal produktif tentunya berbeda dengan NJOP areal belum produktif maupun tidak produktif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No.31/PJ/2014 Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa areal perkebunan yang dikenakan PBB terbagi atas areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman dan areal emplasemen. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan luas kebun terhadap PBB P3 di Jawa Tengah. Selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di Jawa Tengah juga tidak terlalu banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, realisasi penerimaan PBB P3 dari Jawa Tengah yaitu sebesar 32,998 miliar atau sekitar satu pertiga dari PBB P3 sektor perhutanan. Hal ini berbeda dengan daerah yang ada di Pulau Kalimantan ataupun Pulau Sumatera yang mana ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet yang menjadi penyumbang PBB P3 terbesar di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah, bisa disimpulkan bahwa hanya luas hutan yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah. Ini membuktikan bahwa luas hutan yang digunakan untuk produksi bisa meningkatkan penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah secara signifikan. Sementara itu, investasi dan luas kebun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah. Hal ini juga didukung oleh data BPS yang menunjukkan bahwa PBB P3 sektor perhutanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PBB P3 sebesar 95,713 miliar pada tahun 2021 di Jawa Tengah. Dengan demikian, Jawa Tengah memiliki potensi yang cukup besar di sektor perhutanan yang ditandai dengan besarnya realisasi penerimaan PBB P3 dari sektor perhutanan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar perlunya kerja sama serta sinergi yang baik antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Pemerintah Jawa Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten yang ada di Jawa Tengah dalam mengelola kekayaan alam dan kemudahan perizinan untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang nantinya akan berpengaruh pada penerimaan PBB P3.

Selain itu dalam meningkatkan penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah, perlunya penilaian objek pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan dalam penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang dilakukan secara berkelanjutan, supaya NJOP PBB P3 bisa menyesuaikan dengan harga pasaran tanah dan bangunan yang berlaku khususnya NJOP sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal ini dikarenakan ketika NJOP naik tentunya akan memberikan peningkatan terhadap penerimaan PBB P3. Untuk sektor perhutanan di Jawa Tengah, semestinya perlu menjadi perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Jawa Tengah agar dilakukan pengawasan terkait PBB P3 secara menyeluruh, mengingat



sektor perhutanan merupakan sumber PBB P3 terbesar di Jawa Tengah. Keterbatasan di dalam penelitian ini adalah kurangnya variabel tambahan yang mendukung seperti jumlah perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Selain itu, periode penelitian masih terlalu singkat karena hanya dalam kurun waktu tiga tahun Penelitian selanjutnya dapat melengkapi dengan faktor determinan lainnya yang dianggap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanah, & Waluyo. (2015). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Empiris Pada Kecamatan Di Kota Tangerang. *Ultima Accounting*, 7(1), 36–53.
- Agustina, S., Susetyo, D., & Yunisvita. (2016). Pengaruh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 1829–5843.
<https://doi.org/10.29259/jep.v14i1.8772>
- Asyuzal, Edison, & Suandi. (2020). Analisis Valuasi Ekonomi Investasi Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi (Studi Kasus Perkebunan Kelapa Sawit PT XYZ). *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 2(2), 73–79. <https://doi.org/10.22437/jpb.v2i2.9547>
- Bawinti, I., Kawung, G. M. V., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 23–33.
- Febriana, D., & Yulianto, A. (2017). *Management Analysis Journal*. *Management Analysis Journal*2, 6(2). <http://maj.unnes.ac.id>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. (Cetakan ke)*.
- Indartik. (2008). Pengaruh Kebijakan Investasi Kehutanan Terhadap Kondisi Pasar Kayu Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 5(1), 1–14.
- Malinda, Y., Ansofino, A., & Novtarisa, D. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat. *Pendidikan Ekonomi*, 1(1).
- Meiratania, M. (2017). Investasi Perkebunan Karet Dan Kesejahteraan Karet Di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5(3), 1–29.
- Melati, P. M., & Suryowati, K. (2018). Aplikasi Metode Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect Untuk Menganalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 3(1), 41–51. <http://ipm.bps.go.id/>
- Paramban, A., & Musa, H. A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*.
- Rini, W. W., & Astuti, S. (2021). Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatn Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi (JIMBA)*, 3(6), 1209–1219.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i6.970>
- Riskiana, N., & Furqon, I. K. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 54–61. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Sasana, H. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(1), 19–29.



- Setiawan, B., Rachmad, M., & Delis, A. (2020). Analisis Pajak Bumi dan Bangunan P2 serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 183–196.
- Yohansa, M. (2021). Official Statistics untuk Pemodelan Indeks Pendidikan Melalui Analisis Regresi Data Panel. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 1127–1136. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.604>
- Yunarsih. (2015). Analisis Penerimaan PBB Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2009 - 2013. *Telaah Manajemen*, 12(2), 89–101.